



# RENCANA KERJA TAHUNAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETTAMA BNN 2023



Call Center : 184



SMS/ WA : 081 221 675 675



@humas\_bnn



@infobnn\_ri



INFOBNN



HumasNewsBNN



Info\_bnnri

TAHUN 2023  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETTAMA BNN  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan rahmat-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Utama (Settama) Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2023.

Dokumen RKT Biro Humas dan Protokol Settama BNN Tahun 2023 ini merupakan gambaran program kerja Biro Humas dan Protokol Settama BNN dalam satu tahun mendatang yang dijabarkan dari Rencana Strategis Settama BNN 2020-2024 dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) BNN Tahun 2023.

Dokumen RKT Biro Humas dan Protokol Settama BNN Tahun 2023 memuat sasaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Humas dan Protokol sebagai unit pendukung Settama BNN untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN.

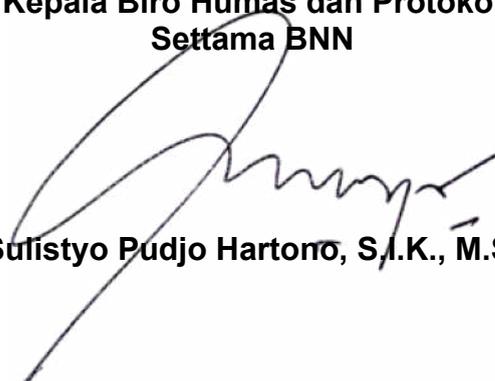
Rencana kinerja program dan kegiatan pada RKT Biro Humas dan Protokol Settama BNN Tahun 2023 menjadi salah satu dokumen sumber bagi perumusan Perjanjian Kinerja Settama BNN Tahun 2023, yang akan digunakan sebagai acuan penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan di tahun 2023.

Ucapan terima kasih, diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan dokumen RKT Biro Humas dan Protokol Settama BNN Tahun 2023 ini.

Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Biro Humas dan Protokol Settama BNN pada tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2023

**Kepala Biro Humas dan Protokol  
Settama BNN**

  
**Sulisty Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. KONDISI UMUM**

#### **A. Permasalahan**

Biro Humas dan Protokol memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama BNN dalam melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, pengelolaan layanan informasi dan perpustakaan, serta urusan protokol dan hubungan antar lembaga.

Dalam pelaksanaan tugas, Biro Humas dan Protokol Settama BNN menyelenggarakan fungsi pelaksanaan peliputan, dokumentasi, wawancara, kunjungan pers, pengelolaan layanan informasi, dan pengelolaan perpustakaan; pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengelolaan media sosial; serta pelaksanaan urusan protokol dan pemeliharaan hubungan komunikasi antar lembaga.

Biro Humas dan Protokol Settama BNN dituntut untuk menjalankan fungsi manajemen komunikasi yang baik dan diharapkan mampu membangun ruang publik yang memberikan kanal bagi proses komunikasi dan interaksi seimbang antara BNN dengan publik dan sebaliknya serta memberikan pelayanan kehumasan yang maksimal.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan strategi dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis antara BNN dengan publik, sehingga memperoleh pengertian, kepercayaan, kerja sama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kehumasan.

Memasuki era disrupsi teknologi digital, isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Biro Humas dan Protokol Settama BNN dalam menjalankan tugas dan fungsi hubungan masyarakat serta keprotokolannya kian kompleks. Adapun identifikasi isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Biro Humas dan Protokol Settama BNN adalah sebagai berikut :

## 1. Isu Hubungan Masyarakat dan Informasi

Permasalahan menonjol dalam isu hubungan masyarakat dan informasi adalah kekuatan dalam membangun dan mempengaruhi opini publik terhadap kiprah BNN dalam melaksanakan tugas P4GN.

## 2. Isu Protokoler

Permasalahan menonjol dalam isu protokoler adalah profesionalisme dan kualitas dalam memberikan pelayanan keprotokoleran kepada para pengguna layanan sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang berlaku.

## B. Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2022, capaian opini publik terhadap BNN, terdapat hasil perhitungan yang menunjukkan tingkat opini Publik terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memiliki hasil akhir capaian sebesar 82 % yang mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat memberikan opini positif terkait kelembagaan BNN. Hasil ini menunjukkan tren positif dari tahun ketahun, hal tersebut merupakan indikasi kegiatan yang dilakukan telah pada posisi yang sesuai. Hal tersebut sejalan dengan indikator kinerja output di level eselon dua yang juga berada pada posisi yang baik

Meskipun dapat dikatakan berhasil, namun pencapaian tersebut masih memiliki kendala dan permasalahan sebagai berikut :

1. Pembentukan opini publik didasarkan pada kinerja BNN yang dipublikasikan oleh media massa. Pembentukan dan penggiringan opini publik melalui berbagai media informasi akan membentuk persepsi atau citra instansi di mata masyarakat. Selain hal tersebut, terbentuknya opini publik juga tidak terlepas dari persepsi masyarakat terhadap BNN di masa lampau dan kinerja masing-masing Satker di BNN secara umum.
2. Terbatasnya dukungan anggaran publikasi kinerja BNN tidak berbanding dengan perkembangan teknologi.
3. Tidak mudah membangun kedekatan dengan media masa yang mempublikasikan kinerja BNN.

4. Belum adanya fungsi kehumasan pada satuan kerja di wilayah dan minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang potensial dalam Bidang Kehumasan.

## **II. LANDASAN HUKUM**

- A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- F. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- G. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- H. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
- I. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;
- J. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- K. Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;
- L. Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2023

## BAB II

### RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETTAMA BNN TAHUN 2023

Biro Humas dan Protokol Settama BNN menetapkan rencana kinerja tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahun 2023 sebagai gambaran rencana program kerja Biro Humas dan Protokol Settama BNN dalam satu tahun mendatang bersama seluruh unit kerja vertikal. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Biro Humas dan Protokol Settama BNN tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (RP RIBU)
1.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Protokoler	3,69 indeks 86 %	9,451,310,000

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini merupakan komitmen Biro Humas dan Protokol Settama BNN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN serta sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Perencanaan kinerja tahunan Biro Humas dan Protokol Settama tahun 2023 ini merupakan salah satu upaya agar lebih terarah dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan tahun 2023 ini disesuaikan dengan kebutuhan BNN khususnya dalam meningkatkan fungsi layanan kehumasan, publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal sehingga terciptanya opini publik yang baik terhadap BNN sebagai *leading sector dalam P4GN*.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan salah satu media informasi publik yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang program kegiatan Biro Humas dan Protokol Settama BNN kepada masyarakat sebagai wujud transparansi informasi dan kinerja BNN menuju *good governance* dan *clean governance*.

**LAMPIRAN**  
**MATRIK RENCANA VOLUME RINCIAN OUTPUT KEGIATAN**  
**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETTAMA BNN**  
**TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>RINCIAN OUTPUT</b>	<b>VOLUME RO</b>
1.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan
		Layanan Protokoler	1 Layanan

**LAMPIRAN**  
**SEBARAN ALOKASI ANGGARAN DAN VOLUME**  
**RINCIAN OUTPUT LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI**  
**KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN**  
**TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>VOLUME RO</b>
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	35.000.000	1 Layanan
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	20.000.000	1 Layanan
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	20.000.000	1 Layanan
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	20.000.000	1 Layanan
5	BNN KOTA SABANG	20.000.000	1 Layanan
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	20.000.000	1 Layanan
7	BNN KOTA LANGSA	20.000.000	1 Layanan
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	20.000.000	1 Layanan
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	20.000.000	1 Layanan
10	BNN KABUPATEN PIDIE	20.000.000	1 Layanan
11	BNN KOTA BANDA ACEH	20.000.000	1 Layanan
12	BNNP SUMATERA UTARA	35.000.000	1 Layanan
13	BNN KABUPATEN KARO	20.000.000	1 Layanan
14	BNN KOTA BINJAI	20.000.000	1 Layanan
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	20.000.000	1 Layanan
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	20.000.000	1 Layanan
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	20.000.000	1 Layanan
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	20.000.000	1 Layanan

19	BNN KABUPATEN LANGKAT	20.000.000	1 Layanan
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	20.000.000	1 Layanan
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	20.000.000	1 Layanan
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	20.000.000	1 Layanan
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	20.000.000	1 Layanan
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	20.000.000	1 Layanan
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	20.000.000	1 Layanan
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	20.000.000	1 Layanan
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	20.000.000	1 Layanan
28	BNNP SUMATERA BARAT	35.000.000	1 Layanan
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	20.000.000	1 Layanan
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	20.000.000	1 Layanan
31	BNN KABUPATEN SOLOK	20.000.000	1 Layanan
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	20.000.000	1 Layanan
33	BNNP RIAU	35.000.000	1 Layanan
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	20.000.000	1 Layanan
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	20.000.000	1 Layanan
36	BNN KOTA PEKANBARU	20.000.000	1 Layanan
37	BNN KOTA DUMAI	20.000.000	1 Layanan
38	BNNP JAMBI	35.000.000	1 Layanan
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	20.000.000	1 Layanan
40	BNN KOTA JAMBI	20.000.000	1 Layanan
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	20.000.000	1 Layanan
42	BNNP SUMATERA SELATAN	35.000.000	1 Layanan

43	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	20.000.000	1 Layanan
44	BNN KOTA PAGARALAM	20.000.000	1 Layanan
45	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	20.000.000	1 Layanan
46	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	20.000.000	1 Layanan
47	BNN KOTA PRABUMULIH	20.000.000	1 Layanan
48	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	20.000.000	1 Layanan
49	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	20.000.000	1 Layanan
50	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	20.000.000	1 Layanan
51	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	20.000.000	1 Layanan
52	BNNP LAMPUNG	35.000.000	1 Layanan
53	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	20.000.000	1 Layanan
54	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	20.000.000	1 Layanan
55	BNN KOTA METRO	20.000.000	1 Layanan
56	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	20.000.000	1 Layanan
57	BNN KABUPATEN WAY KANAN	20.000.000	1 Layanan
58	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	35.000.000	1 Layanan
59	BNN KABUPATEN BANGKA	20.000.000	1 Layanan
60	BNN KOTA PANGKAL PINANG	20.000.000	1 Layanan
61	BNN KABUPATEN BELITUNG	20.000.000	1 Layanan
62	BNNP BANGKA SELATAN	35.000.000	1 Layanan
63	BNNP KEPULAUAN RIAU	35.000.000	1 Layanan
64	BNN KABUPATEN KARIMUN	20.000.000	1 Layanan
65	BNN KOTA BATAM	20.000.000	1 Layanan
66	BNN KOTA TANJUNG PINANG	20.000.000	1 Layanan

67	BNNP BENGKULU	35.000.000	1 Layanan
68	BNN KOTA BENGKULU	20.000.000	1 Layanan
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	20.000.000	1 Layanan
70	BNNP DKI JAKARTA	35.000.000	1 Layanan
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	20.000.000	1 Layanan
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	20.000.000	1 Layanan
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	20.000.000	1 Layanan
74	BNNP BANTEN	35.000.000	1 Layanan
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	20.000.000	1 Layanan
76	BNN KOTA CILEGON	20.000.000	1 Layanan
77	BNN KOTA TANGERANG	20.000.000	1 Layanan
78	BNNP JAWA BARAT	35.000.000	1 Layanan
79	BNN KABUPATEN BOGOR	20.000.000	1 Layanan
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	20.000.000	1 Layanan
81	BNN KOTA BANDUNG	20.000.000	1 Layanan
82	BNN KOTA CIREBON	20.000.000	1 Layanan
83	BNN KOTA CIMAHI	20.000.000	1 Layanan
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	20.000.000	1 Layanan
85	BNN KABUPATEN GARUT	20.000.000	1 Layanan
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	20.000.000	1 Layanan
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	20.000.000	1 Layanan
88	BNN KOTA DEPOK	20.000.000	1 Layanan
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	20.000.000	1 Layanan
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	20.000.000	1 Layanan
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	20.000.000	1 Layanan

92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	20.000.000	1 Layanan
93	BNNP JAWA TENGAH	35.000.000	1 Layanan
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	20.000.000	1 Layanan
95	BNN KOTA TEGAL	20.000.000	1 Layanan
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	20.000.000	1 Layanan
97	BNN KABUPATEN CILACAP	20.000.000	1 Layanan
98	BNN KABUPATEN KENDAL	20.000.000	1 Layanan
99	BNN KABUPATEN BATANG	20.000.000	1 Layanan
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	20.000.000	1 Layanan
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	20.000.000	1 Layanan
102	BNN KOTA SURAKARTA	20.000.000	1 Layanan
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	35.000.000	1 Layanan
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	25.000.000	1 Layanan
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	25.000.000	1 Layanan
106	BNN KABUPATEN BANTUL	25.000.000	1 Layanan
107	BNNP JAWA TIMUR	35.000.000	1 Layanan
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	20.000.000	1 Layanan
109	BNN KOTA MOJOKERTO	20.000.000	1 Layanan
110	BNN KOTA MALANG	20.000.000	1 Layanan
111	BNN KOTA BATU	20.000.000	1 Layanan
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	20.000.000	1 Layanan
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	20.000.000	1 Layanan
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	20.000.000	1 Layanan
115	BNN KOTA SURABAYA	20.000.000	1 Layanan
116	BNN KOTA KEDIRI	20.000.000	1 Layanan

117	BNN KABUPATEN MALANG	20.000.000	1 Layanan
118	BNN KABUPATEN GRESIK	20.000.000	1 Layanan
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	20.000.000	1 Layanan
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	20.000.000	1 Layanan
121	BNN KABUPATEN BLITAR	20.000.000	1 Layanan
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	20.000.000	1 Layanan
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	20.000.000	1 Layanan
124	BNN KABUPATEN TUBAN	20.000.000	1 Layanan
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	35.000.000	1 Layanan
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	20.000.000	1 Layanan
127	BNN KABUPATEN SINTANG	20.000.000	1 Layanan
128	BNN KOTA PONTIANAK	20.000.000	1 Layanan
129	BNN KOTA SINGKAWANG	20.000.000	1 Layanan
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	20.000.000	1 Layanan
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	20.000.000	1 Layanan
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	20.000.000	1 Layanan
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	35.000.000	1 Layanan
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	20.000.000	1 Layanan
135	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	20.000.000	1 Layanan
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	35.000.000	1 Layanan
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	20.000.000	1 Layanan
138	BNN KOTA BANJARMASIN	20.000.000	1 Layanan
139	BNN KOTA BANJARBARU	20.000.000	1 Layanan
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	20.000.000	1 Layanan
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	20.000.000	1 Layanan

142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	20.000.000	1 Layanan
143	BNN KABUPATEN TABALONG	20.000.000	1 Layanan
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	20.000.000	1 Layanan
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	35.000.000	1 Layanan
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	20.000.000	1 Layanan
147	BNN KOTA SAMARINDA	20.000.000	1 Layanan
148	BNN KOTA BONTANG	20.000.000	1 Layanan
149	BNNP KALIMANTAN UTARA	35.000.000	1 Layanan
150	BNN KOTA TARAKAN	20.000.000	1 Layanan
151	BNN KABUPATEN NUNUKAN	20.000.000	1 Layanan
152	BNNP SULAWESI UTARA	35.000.000	1 Layanan
153	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	20.000.000	1 Layanan
154	BNN KOTA BITUNG	20.000.000	1 Layanan
155	BNN KOTA MANADO	20.000.000	1 Layanan
156	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	20.000.000	1 Layanan
157	BNNP SULAWESI TENGAH	35.000.000	1 Layanan
158	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	20.000.000	1 Layanan
159	BNN KABUPATEN MOROWALI	20.000.000	1 Layanan
160	BNN KOTA PALU	20.000.000	1 Layanan
161	BNN KABUPATEN DONGGALA	20.000.000	1 Layanan
162	BNN KABUPATEN POSO	20.000.000	1 Layanan
163	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	20.000.000	1 Layanan
164	BNNP SULAWESI SELATAN	35.000.000	1 Layanan
165	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	20.000.000	1 Layanan

166	BNN KABUPATEN BONE	20.000.000	1 Layanan
167	BNN KOTA PALOPO	20.000.000	1 Layanan
168	BNNP SULAWESI TENGGARA	35.000.000	1 Layanan
169	BNN KABUPATEN MUNA	20.000.000	1 Layanan
170	BNN KABUPATEN KOLAKA	20.000.000	1 Layanan
171	BNN KOTA KENDARI	20.000.000	1 Layanan
172	BNN KOTA BAU-BAU	20.000.000	1 Layanan
173	BNNP SULAWESI BARAT	35.000.000	1 Layanan
174	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	20.000.000	1 Layanan
175	BNNP MALUKU	35.000.000	1 Layanan
176	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	20.000.000	1 Layanan
177	BNN KOTA TUAL	20.000.000	1 Layanan
178	BNNP MALUKU UTARA	35.000.000	1 Layanan
179	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	20.000.000	1 Layanan
180	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	20.000.000	1 Layanan
181	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	20.000.000	1 Layanan
182	BNNP BALI	35.000.000	1 Layanan
183	BNN KOTA DENPASAR	20.000.000	1 Layanan
184	BNN KABUPATEN BADUNG	20.000.000	1 Layanan
185	BNN KABUPATEN GIANYAR	20.000.000	1 Layanan
186	BNN KABUPATEN BULELENG	20.000.000	1 Layanan
187	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	20.000.000	1 Layanan
188	BNN KABUPATEN KARANGASEM	20.000.000	1 Layanan
189	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	35.000.000	1 Layanan
190	BNN KABUPATEN BIMA	20.000.000	1 Layanan

191	BNN KOTA MATARAM	20.000.000	1 Layanan
192	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	20.000.000	1 Layanan
193	BNN KABUPATEN SUMBAWA	20.000.000	1 Layanan
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	35.000.000	1 Layanan
195	BNN KABUPATEN BELU	20.000.000	1 Layanan
196	BNN KOTA KUPANG	20.000.000	1 Layanan
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	20.000.000	1 Layanan
198	BNNP GORONTALO	35.000.000	1 Layanan
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	20.000.000	1 Layanan
200	BNN KOTA GORONTALO	20.000.000	1 Layanan
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	20.000.000	1 Layanan
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	20.000.000	1 Layanan
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	20.000.000	1 Layanan
204	BNNP PAPUA	32.052.000	1 Layanan
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	17.500.000	1 Layanan
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	17.500.000	1 Layanan
207	BNNP PAPUA BARAT	32.052.000	1 Layanan
208	SEKRETARIAT UTAMA	9,451,310,000	2 Layanan